

DISINFORMASI, OLIGARKI, DAN KORUPSI MENJADI TANTANGAN MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA

Aisyah Devinta Arifin¹, Silma Najlatul Masna², Dini Rhiznawati³, Muhammad Zidan Sasmitha⁴, Yasinta Tri Jaya Buana⁵, Michelle Anjelina Putri⁶, Saifuddin Zuhri⁷

Email: 24025010106@student.upnjatim.ac.id, 24025010098@student.upnjatim.ac.id, 24025010102@student.upnjatim.ac.id, 24025010111@student.upnjatim.ac.id, 24025010117@student.upnjatim.ac.id, 24025010134@student.upnjatim.ac.id, saifuddin.upn@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

<p>Abstrack</p> <p><i>Indonesian democracy faces serious challenges that threaten its sustainability in the future, namely disinformation, oligarchy, and corruption. Disinformation spread through social media undermines the integrity of public information, triggers political polarization, and weakens trust in democratic institutions. Oligarchy, as the dominance of a handful of economic and political elites, undermines the principle of people's representation with policies that favor the interests of certain groups. Meanwhile, systemic corruption undermines governance, deepens social inequality, and reduces the quality of public participation. This research uses a descriptive qualitative method with thematic analysis of secondary sources such as scientific articles, anti-corruption agency reports, and digital media content. The results show that these three challenges are interrelated and require holistic solutions, including strengthening digital literacy, reforming anti-oligarchy policies, and fighting corruption through multi-sector collaboration. Active community participation, civic education, and oversight of democratic institutions are key to ensuring Indonesia's democracy remains inclusive and equitable.</i></p> <p>Keywords: <i>Indonesian democracy; disinformation; oligarchy; corruption; digital literacy; public participation.</i></p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p>	<p>Article History Received: Mei 2025 Reviewed: Mei 2025 Published: Mei 2025</p> <p>Copyright : Author Publish by : CAUSA</p>  <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</p>
---	---

Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius yang mengancam keberlanjutannya di masa depan, yakni disinformasi, oligarki, dan korupsi. Disinformasi yang menyebar melalui media sosial merusak integritas informasi publik, memicu polarisasi politik, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Oligarki, sebagai dominasi segelintir elite ekonomi dan politik, menggerogoti prinsip keterwakilan rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu, korupsi yang sistemik merusak tata kelola pemerintahan, memperdalam ketimpangan sosial, dan mengurangi kualitas partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis tematik terhadap sumber sekunder seperti artikel ilmiah, laporan lembaga anti-korupsi, dan konten media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan solusi holistik, termasuk penguatan literasi digital, reformasi kebijakan anti-oligarki, serta pemberantasan korupsi melalui kolaborasi multisektor. Partisipasi aktif masyarakat, pendidikan kewarganegaraan, dan pengawasan institusi demokrasi menjadi kunci untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Demokrasi Indonesia; disinformasi; oligarki; korupsi; literasi digital; partisipasi publik.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Purnamawati, 2020). Demokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan serius yang dapat mengancam keberlanjutannya di masa depan. Salah satu ancaman utama adalah disinformasi yang semakin marak, terutama melalui media sosial, yang memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat. Fenomena ini menciptakan polarisasi politik yang tajam dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Akibatnya, proses politik yang sehat sering kali terganggu oleh penyebaran informasi palsu yang memanipulasi opini publik.

Selain disinformasi, pengaruh oligarki juga menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan (Koho, 2021). Struktur kekuasaan yang terkonsentrasi pada segelintir elite ekonomi dan politik sering kali mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Oligarki ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok tertentu dibandingkan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia rentan kehilangan esensinya sebagai sistem pemerintahan yang berorientasi pada kehendak rakyat.

Korupsi melengkapi rangkaian tantangan yang menggerogoti masa depan demokrasi Indonesia. Salah satu penyebab utama korupsi adalah pemerintahan yang otoriter, yang menyalahgunakan kekuasaan tanpa pengawasan (Fauzie & Riani, 2025). Praktik korupsi yang meluas tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak integritas lembaga-lembaga demokratis. Ketidakmampuan untuk memberantas korupsi secara efektif membuat masyarakat semakin skeptis terhadap pemerintahan dan proses politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi disinformasi, oligarki, dan korupsi demi memastikan demokrasi Indonesia tetap kokoh dan inklusif di masa depan.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia saat ini tengah dihadapkan pada serangkaian krisis yang mengancam kredibilitas dan keberlanjutan sistem demokrasinya. Rentetan kasus korupsi besar yang mencuat belakangan ini, seperti skandal korupsi di Pertamina yang melibatkan pejabat tinggi dan dugaan mark-up anggaran triliunan rupiah, menjadi cemin betapa korupsi telah mengakar kuat dalam struktur birokrasi negara. Tidak hanya itu, maraknya disinformasi dan hoaks yang beredar di media sosial terkait berbagai isu politik dan ekonomi telah memperkeruh ruang diskusi publik dan memecah belah masyarakat berdasarkan narasi yang seringkali tidak berdasar. Sementara itu, konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada segelintir elite atau oligarki semakin menguat, terlihat dari dominasi konglomerat tertentu dalam sektor strategis dan pengaruh mereka terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga fenomena ini korupsi sistemik yang terus berlanjut, disinformasi yang meracuni ruang publik, dan oligarki yang mengkonsolidasikan kekuasaan tidak berdiri sendiri melainkan saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari seluruh elemen bangsa karena jika dibiarkan berlarut-larut, dapat mengikis fondasi demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi dan mengancam masa depan Indonesia sebagai negara demokratis yang stabil dan berkeadilan.

Demokrasi Indonesia, sejak era reformasi, telah mengalami berbagai kemajuan, namun disisi lain juga menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam keberlangsungannya di masa depan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar seperti struktur kekuasaan, integritas informasi, dan moralitas penyelenggara negara. Berdasarkan kajian literatur, data survei, serta dinamika sosial-politik yang berkembang, terdapat tiga isu utama yang menjadi akar permasalahan dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini, yakni disinformasi, dominasi oligarki, dan praktik korupsi yang merajalela.

Era digital telah membawa perubahan mendalam dalam cara kita mengonsumsi dan menghasilkan informasi. Munculnya media sosial, platform berita daring, dan forum online telah memberikan wadah baru untuk berekspresi, tetapi juga membuka pintu lebar-lebar untuk isu-isu hukum dan etika. Suatu contoh kasus yang mencolok adalah kenaikan fenomena berita palsu atau disinformasi, yang dapat secara substansial merusak integritas informasi dan memengaruhi dinamika sosial secara signifikan (Nisa, 2024). Disinformasi berkembang pesat terutama melalui media sosial, yang kini menjadi sumber utama informasi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Survei dari Kominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2022

menunjukkan bahwa sekitar 67% masyarakat Indonesia mendapatkan informasi politik dari media sosial, namun 45%-nya tidak memverifikasi kebenaran informasi yang diterima.

Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih rendah, sehingga sangat rentan terhadap provokasi, manipulasi berita, dan narasi yang bersifat adu domba. Dalam konteks pemilu, disinformasi dapat menggiring opini secara tidak sehat, mengganggu proses demokrasi, bahkan memecah belah masyarakat. Jika tidak ditangani dengan serius, maka penyebaran disinformasi diprediksi akan semakin canggih seiring berkembangnya teknologi seperti artificial intelligence dan deepfake, yang memungkinkan manipulasi konten secara meyakinkan. Akibatnya, masyarakat akan kesulitan membedakan antara fakta dan opini, dan ini berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik secara signifikan.

Masalah kedua yang sangat krusial adalah dominasi oligarki dalam sistem politik Indonesia. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara yang kekuasaannya dipegang oleh kelompok tertentu. Kelompok ini biasanya berasal dari orang-orang dengan pengaruh yang kuat, bisa dilihat dari kekayaan, pendidikan, hingga hubungannya dengan pemerintahan bahkan militer (Yusri, 2023). Dalam praktiknya, oligarki memanipulasi proses demokrasi untuk mempertahankan kepentingan mereka, termasuk melalui pembiayaan politik, kooptasi partai, dan pengaruh terhadap media. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural dalam partisipasi politik dan menghasilkan kebijakan yang tidak selalu mencerminkan aspirasi masyarakat luas demokrasi untuk mempertahankan kepentingan mereka, termasuk melalui pembiayaan politik, kooptasi partai, dan pengaruh terhadap media. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural dalam partisipasi politik dan menghasilkan kebijakan yang tidak selalu mencerminkan aspirasi masyarakat luas.

Menurut laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2023, sebanyak 56% calon legislatif memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau afiliasi langsung dengan perusahaan besar, yang menunjukkan eratnya hubungan antara kapital dan kekuasaan. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, maka sistem politik Indonesia akan bergerak menuju demokrasi prosedural semata, tanpa substansi keterwakilan yang sejati. Masyarakat hanya akan menjadi objek pemilu, sementara arah kebijakan ditentukan oleh segelintir elite yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Oligarki juga menghambat lahirnya pemimpin alternatif dari kalangan akar rumput, perempuan, atau kelompok minoritas yang memiliki kapasitas, tetapi tidak memiliki modal besar. Keadaan ini membuat demokrasi kehilangan dinamika yang sehat, karena kompetisi politik tidak berlangsung secara adil dan terbuka.

Korupsi merupakan ancaman sistemik yang terus menggerogoti fondasi demokrasi di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga melibatkan pejabat tinggi, politisi, dan bahkan aparat penegak hukum. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2023 menunjukkan skor 34 dari 100, yang menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara, stagnan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari optimal. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memperburuk ketimpangan sosial.

Dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik adalah elemen vital untuk memastikan partisipasi yang bermakna. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, bahwa pejabat publik memperkaya diri sendiri melalui jabatan, dan bahwa penindakan hukum tebang pilih, maka partisipasi rakyat akan berubah menjadi apatisme atau bahkan

sinisme terhadap sistem politik. Kondisi ini berbahaya karena dapat melahirkan ketidakstabilan sosial-politik dan memperbesar kemungkinan munculnya otoritarianisme sebagai respons terhadap krisis kepercayaan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, yaitu disinformasi, oligarki, dan korupsi yang menjadi tantangan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen berupa artikel ilmiah, pemberitaan media daring, arsip peraturan perundang-undangan, serta konten digital dari platform media sosial yang memuat narasi atau wacana terkait topik penelitian.

Seluruh dokumen dianalisis secara tematik, di mana peneliti melakukan identifikasi isu, pengelompokan informasi, serta penarikan makna dari isi dokumen berdasarkan kategori seperti kontrol oligarki terhadap media, pola penyebaran disinformasi, dan keterkaitan antara korupsi dan penurunan kualitas demokrasi. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemilahan sumber yang kredibel, pembacaan mendalam, pencatatan data penting, hingga penyusunan sintesis tematik untuk mendukung tujuan akhir riset. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan yang berbeda. Dengan prosedur ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran faktual dan interpretatif mengenai tantangan struktural yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, memberikan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melalui pemilu yang jujur dan terbuka (Akbar et al., 2023). Namun, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius, yaitu disinformasi, oligarki, dan korupsi. Disinformasi dapat membentuk opini publik yang keliru dan menggerus kepercayaan terhadap institusi demokrasi (Diantini, 2025). Oligarki menyebabkan dominasi elit politik dan ekonomi atas kebijakan negara, sementara korupsi merusak supremasi hukum serta memperdalam ketimpangan sosial. Ketiganya saling berkelindan dan menjadi ancaman sistemik bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Individu, kelompok, dan organisasi memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemimpin politik, jurnalis, akademisi, dan warga negara biasa turut serta dalam menjaga integritas demokrasi melalui partisipasi aktif dan pengawasan publik. Partai politik, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas media sosial menjadi aktor penting dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik (Harahap et al., 2023). Namun, setiap aktor ini juga menghadapi risiko seperti manipulasi informasi, konflik internal, dan penyalahgunaan kekuasaan. Literasi media dan kesadaran politik menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tahan terhadap disinformasi dan praktik antidemokrasi (Yuniarto, 2020).

Pemerintah Indonesia telah merespons tantangan demokrasi melalui penguatan lembaga seperti KPK dalam pemberantasan korupsi (Rahmanul & Adiarto, 2020), serta peran BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani disinformasi digital. Langkah strategis lainnya mencakup kampanye literasi informasi, reformasi kebijakan anti-oligarki, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Koordinasi nasional dibutuhkan agar penanganan isu ini efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ruang kelas ataupun dalam lingkup kecil menjadi medium strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui literasi digital, diskusi terbuka, debat, dan simulasi pemilu. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat dalam proyek advokasi yang menyoroti bahaya disinformasi, oligarki, dan korupsi secara kreatif melalui media sosial. Hal ini memperkuat karakter demokratis serta mendorong aksi nyata di luar lingkungan kampus (Harahap et al., 2023).

Gagasan dan solusi dari kelas dapat dikembangkan menjadi proposal kebijakan yang ditujukan kepada lembaga pemerintah. Mahasiswa dapat memanfaatkan forum ilmiah, program magang, serta platform digital untuk menyoroti aspirasi mereka. Kampanye media sosial dan petisi daring menjadi sarana efektif untuk menggali dukungan publik terhadap kebijakan yang diusulkan. Dengan strategi yang tepat, kontribusi dari generasi muda dapat memperkuat fondasi demokrasi Indonesia secara berkelanjutan.

Pada Sabtu, 17 Mei 2025, di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk korupsi di Indonesia saat menutup Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa upaya melawan korupsi akan dilakukan tanpa pandang bulu demi meninggalkan warisan kepemimpinan yang bersih dan adil bagi bangsa. Ia juga menyampaikan bahwa selama enam bulan masa pemerintahannya, negara telah berhasil menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang rakyat sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi. Meski dihadapkan pada tantangan dan tekanan terhadap aparat penegak hukum, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur sedikit pun dalam melanjutkan agenda tersebut. Ia pun meminta dukungan masyarakat untuk menjaga integritas bersama dan menegaskan tekad serta keberaniannya untuk terus melanjutkan perjuangan melawan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Respons tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan publik dan dorongan moral bagi aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa takut tekanan. Sebagai mahasiswa yang menentang korupsi, pernyataan ini menjadi motivasi untuk terus mengawal komitmen pemerintah secara kritis, mahasiswa sebagai kontrol sosial dengan mengawasi kebijakan pemerintah agar transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia berada pada titik krusial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak. Disinformasi yang masif melalui media sosial telah merusak kualitas informasi publik dan memicu polarisasi di tengah masyarakat. Dominasi oligarki dalam politik mempersempit ruang partisipasi rakyat serta mengaburkan esensi demokrasi sebagai sistem yang berorientasi pada

kepentingan bersama. Sementara itu, korupsi terus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan menghambat pembangunan nasional secara adil dan merata.

Tantangan-tantangan ini bukanlah akhir dari perjalanan demokrasi Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda, upaya perbaikan masih sangat mungkin dilakukan. Pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada literasi digital, kesadaran politik, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Dengan partisipasi aktif semua elemen bangsa, demokrasi Indonesia dapat terus tumbuh menjadi lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 627-635.
- Diantini, N. (2025). Berpikir Kritis Dalam Menghadapi Tantangan Disinformasi di Era Digital. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 830-837.
- Fauzie, M., & Riani, N. Z. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 2(1).
- Harahap, A. O., Fadilla, P. A., Rangkuti, K. H., Kesuma, B., Adilla, N., Khairani, Y. D., ... & Labib, M. D. (2023). Mewujudkan Masyarakat Demokratis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1), 79-88.
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60-73.
- Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1-11.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.
- Rahmanul, R., & Adianto, A. (2020). Peran KPK dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1), 28-38.
- Yusri, Y., & Mahuli, J. I. (2023). Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 78-84.
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi melalui Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Eduksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(1).